



Dimensi Filsafat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam: Kajian Peran Manusia dalam Menjaga Keseimbangan Lingkungan

¹Lora Santika, ²Muhammad Sarjan

^{1,2}Magister Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Universitas Mataram, Indonesia
Email Korespondensi: Lorasantika97@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 04 April 2025 Revised: 08 April 2025 Published: 30 April 2025 Keywords environmental philosophy; natural resources; ecological ethics; sustainability; environmental crisis	Philosophical Dimensions in Natural Resource Management: A Study of the Role of Humans in Maintaining Environmental Balance. The global environmental crisis—marked by deforestation, land degradation, pollution, and climate change—is a consequence of unsustainable natural resource (NR) exploitation. Population growth and the dominance of pragmatic economic paradigms are key drivers of environmental destruction. This article examines the role of philosophy in NR management as an alternative approach that is more ethical and sustainable. Using a literature review method, this study analyzes environmental philosophical perspectives—particularly anthropocentric, biocentric, and ecocentric ethics—and their relevance in shaping policies and ecological awareness. The findings show that integrating philosophical values can foster moral awareness toward nature, strengthen justice-based environmental policies, and support holistic development approaches. The study also highlights failures in NR management due to ethical crises, such as overfishing in Indonesian waters and deforestation linked to food estate projects. Community-based management models and local wisdom—such as sasi and subak systems—are shown to be more aligned with ecocentric and sustainable principles. Therefore, a paradigm shift is needed—from an exploitative approach to a philosophical one that sees humans as part of, not rulers over, ecosystems. Integrating philosophy into NR management is not only essential for environmental preservation but also for ensuring the sustainability of future generations.
Informasi Artikel	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 04 April 2025 Direvisi: 08 April 2025 Dipublikasi: 30 April 2025 Kata kunci filsafat lingkungan; sumber daya alam; etika ekologi; keberlanjutan; krisis lingkungan	Krisis lingkungan global yang ditandai oleh deforestasi, degradasi lahan, pencemaran, dan perubahan iklim merupakan dampak dari eksploitasi sumber daya alam (SDA) yang tidak berkelanjutan. Pertumbuhan populasi dan dominasi paradigma ekonomi pragmatis menjadi pendorong utama kerusakan lingkungan. Artikel ini mengkaji peran filsafat dalam pengelolaan SDA sebagai pendekatan alternatif yang lebih etis dan berkelanjutan. Melalui metode studi pustaka, penelitian ini bertujuan menganalisis perspektif filsafat lingkungan, khususnya etika antroposentris, biocentris, dan ekosentris, serta relevansinya dalam membentuk kebijakan dan kesadaran ekologis. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai filosofis dapat mendorong kesadaran moral manusia terhadap alam, memperkuat kebijakan berbasis keadilan lingkungan, dan mendukung pendekatan holistik dalam pembangunan. Studi ini juga menyoroti kegagalan pengelolaan SDA akibat krisis etika, seperti pada kasus overfishing di perairan Indonesia dan deforestasi dalam proyek food estate. Model pengelolaan berbasis komunitas dan kearifan lokal, seperti sistem sasi dan subak, terbukti lebih selaras dengan prinsip ekosentrisme dan keberlanjutan. Oleh karena itu, diperlukan pergeseran paradigma dari pendekatan eksploitatif menuju pendekatan filosofis yang menempatkan manusia sebagai bagian dari ekosistem, bukan penguasa atasnya. Integrasi filsafat dalam pengelolaan SDA tidak hanya penting untuk kelestarian lingkungan, tetapi juga untuk menjamin keberlanjutan hidup generasi mendatang.

Sitasi: Santika, L., & Sarjan, M. (2025). Dimensi Filsafat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam: Kajian Peran Manusia dalam Menjaga Keseimbangan Lingkungan. *Lambda: Jurnal Pendidikan MIPA dan Aplikasinya*, 5(1), 54-60.

PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, dunia menghadapi krisis lingkungan yang semakin mengkhawatirkan akibat eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Deforestasi, degradasi lahan, pencemaran air dan udara, serta perubahan iklim merupakan dampak nyata dari aktivitas manusia yang tidak berkelanjutan. Menurut Badan Pusat Statistik (2018) menyebutkan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 berjumlah 242.518 ribu jiwa, kemudian jumlahnya pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 261.890 ribu jiwa. Pertumbuhan populasi yang pesat dan peningkatan kebutuhan ekonomi sering kali menjadi alasan utama eksploitasi alam tanpa mempertimbangkan keseimbangan ekosistem. Manusia telah menjadi faktor utama yang mempengaruhi peristiwa lingkungan dengan cara yang sangat bervariasi dan signifikan (Pangesti et al., 2023). Paradigma pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi telah menyebabkan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali, sehingga mengancam keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang. Menurut Nasution (2020), Semakin meningkatnya jumlah penduduk, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia, mengakibatkan tekanan tambahan terhadap sumber daya alam dan infrastruktur lingkungan.

Salah satu penyebab utama krisis lingkungan adalah dominasi pendekatan pragmatis dalam pengelolaan sumber daya alam yang lebih menitikberatkan pada keuntungan jangka pendek. Dalam konteks ini, pendekatan filosofis menjadi penting untuk mengkritisi cara manusia berinteraksi dengan alam serta mencari solusi yang lebih holistik dan berkelanjutan. Filsafat, sebagai disiplin yang membahas hakikat keberadaan dan hubungan manusia dengan dunia, dapat memberikan kerangka berpikir yang lebih mendalam dalam memahami peran manusia dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Dimensi filsafat dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) mencerminkan bagaimana prinsip-prinsip filosofis seperti etika, epistemologi, dan metafisika dapat diterapkan dalam pengambilan keputusan terkait pemanfaatan dan pelestarian lingkungan. Pemikiran filosofis dapat membantu merumuskan prinsip etika lingkungan, mengidentifikasi nilai-nilai moral dalam pengelolaan sumber daya alam, serta mendorong kebijakan yang lebih berorientasi pada keberlanjutan.

Hubungan antara manusia dan alam telah menjadi topik utama dalam berbagai perspektif filsafat sepanjang sejarah. Dalam tradisi filsafat Barat, pendekatan antroposentris yang menempatkan manusia sebagai pusat alam semesta sering kali menjadi dasar bagi eksploitasi sumber daya alam. Menurut Muthmainnah, et al., (2020) Alam dipandang sebagai hal yang dapat diatur sedemikian rupa oleh manusia dan selalu dapat ditaklukkan karena manusia akan selalu mampu menciptakan berbagai terobosan teknologi untuk mengatasi persoalan-persoalan yang muncul. Namun, perspektif lain seperti biosentrisme dan ekosentrisme menekankan bahwa manusia hanyalah bagian dari ekosistem yang lebih luas, sehingga memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga keseimbangan lingkungan.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih filosofis dalam pengelolaan sumber daya alam guna memastikan bahwa eksploitasi yang dilakukan tetap mempertimbangkan keseimbangan ekosistem. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan serta keterbatasan pendekatan pragmatis dalam memastikan keberlanjutan ekosistem. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji peran integrasi filsafat dalam pengelolaan sumber daya alam guna membangun kesadaran ekologis dan memperkuat etika lingkungan. Lebih lanjut, penelitian ini menjelaskan bagaimana

pandangan ekosentrisme dan biosentrisme menempatkan manusia sebagai bagian dari ekosistem yang memiliki tanggung jawab moral dalam menjaga keseimbangannya.

METODE

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah metode deskriptif (Armawi, 2013) dan kajian pustaka atau studi literatur (Kaelan, 2005). Kajian bersifat kajian kepustakaan (*Library Research*) yang difokuskan pada penelusuran dan penelaahan literatur serta bahan pustaka yang dianggap ada kaitannya dengan krisis lingkungan dan filsafat (Qurrotul'ain & Soleh, 2024). Metode ini dilakukan dengan menganalisis berbagai bahan bacaan, jurnal, buku, dan dokumen relevan yang membahas hubungan antara manusia, filsafat, dan pengelolaan sumber daya alam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Manusia dalam Menjaga Keseimbangan Lingkungan

Manusia memiliki peran sentral dalam menjaga keseimbangan lingkungan, baik sebagai pelaku yang dapat merusak maupun sebagai agen yang berkontribusi pada pelestarian ekosistem. Filsafat lingkungan berperan dalam membentuk kesadaran dan nilai-nilai yang mendasari keputusan manusia terkait pengelolaan sumber daya alam (SDA). Dalam konteks ini, peran manusia dapat dijelaskan melalui beberapa aspek berikut:

1. Manusia sebagai Agen Perubahan

Manusia memiliki posisi yang unik di bumi karena kemampuan berpikir kritis dan interaksi sosial. Sebagai makhluk yang dapat memahami serta menganalisis lingkungan sekitar, manusia berperan penting dalam melestarikan kehidupan (Najma Hilyah Azla et al., 2024). Sebagai makhluk yang memiliki akal dan moral, manusia tidak hanya bertindak sebagai pengguna sumber daya alam tetapi juga sebagai agen perubahan yang mampu mengarahkan pengelolaan lingkungan ke arah yang lebih berkelanjutan.

a) Kesadaran Ekologis dan Moralitas dalam Pengelolaan Lingkungan

Kesadaran ekologis adalah pemahaman manusia tentang keterkaitan antara aktivitasnya dengan kondisi lingkungan, yang mencakup pemahaman mengenai dampak deforestasi, pencemaran, dan eksploitasi sumber daya yang berlebihan terhadap ekosistem. Selain itu, kesadaran ini juga mencerminkan tanggung jawab moral dalam menjaga keseimbangan alam, dengan melihat lingkungan bukan hanya sebagai sumber eksploitasi ekonomi, tetapi juga sebagai entitas yang perlu dilestarikan demi keberlanjutan kehidupan generasi mendatang. Pendekatan filsafat lingkungan dalam rangka penanaman kesadaran ekologis menjadi layak untuk dipertimbangkan dan dijadikan bahan guna melakukan penilaian terhadap kondisi riil lingkungan hidup di wilayah tertentu (Eko Ariwidodo, 2023). Prinsip kearifan lokal juga berperan penting dalam pengelolaan lingkungan, di mana masyarakat tradisional sering menerapkan strategi ekologis yang berkelanjutan, seperti sistem *Sasi* di Maluku dan *Subak* di Bali.

b) Nilai-nilai Etika Lingkungan dalam Praktik Pengelolaan Sumber Daya Alam

Etika lingkungan adalah cabang filsafat yang berfokus pada hubungan manusia dengan alam, dengan berbagai nilai yang relevan dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA). Etika antroposentris memandang manusia sebagai pusat alam dan lingkungan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia, meskipun pendekatan ini sering kali menyebabkan eksploitasi berlebihan. Nilai-nilai Etika Lingkungan dalam Praktik Pengelolaan Sumber Daya Alam (Eko Ariwidodo, 2023). Sebaliknya, etika biocentris mengakui bahwa semua makhluk hidup memiliki nilai intrinsik dan berhak untuk dilestarikan, bukan hanya demi kepentingan manusia. Sementara itu, etika ekosentris menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem secara keseluruhan, bukan hanya individu atau spesies tertentu. Dalam praktiknya, penerapan etika lingkungan

dapat diwujudkan melalui kebijakan pengelolaan SDA yang berkelanjutan, seperti pemanfaatan hasil laut secara bijak, perlindungan kawasan konservasi, dan penerapan teknologi ramah lingkungan.

2. Penerapan Prinsip Filsafat dalam Kebijakan Lingkungan

Kebijakan lingkungan yang baik seharusnya tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan prinsip-prinsip filsafat yang lebih luas.

a) Pendekatan Holistik dalam Kebijakan Lingkungan Berbasis Filsafat

Pendekatan holistik dalam kebijakan lingkungan berfokus pada keterkaitan antara berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, ekonomi, dan ekologi, dengan menekankan prinsip-prinsip yang mendukung keseimbangan alam. Salah satunya adalah konsep ekologi dalam (*deep ecology*), yang menegaskan bahwa manusia merupakan bagian dari alam dan harus hidup selaras dengan ekosistem. Selain itu, prinsip keadilan lingkungan memastikan bahwa manfaat dan beban dari pemanfaatan sumber daya alam (SDA) didistribusikan secara adil kepada seluruh masyarakat, termasuk generasi mendatang. Prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) juga menjadi elemen penting, dengan mengedepankan perlunya tindakan pencegahan terhadap risiko kerusakan lingkungan yang belum sepenuhnya dipahami. Pendekatan holistik ini dapat diterapkan dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan, pengelolaan limbah industri, serta regulasi eksploitasi SDA agar tidak berdampak negatif pada ekosistem.

b) Integrasi Konsep Keberlanjutan dalam Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Keberlanjutan (*sustainability*) adalah konsep utama dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya saat ini tidak mengorbankan kepentingan generasi mendatang. Prinsip ini dapat diterapkan dalam berbagai aspek, seperti pengelolaan perikanan berkelanjutan melalui sistem kuota tangkap ikan untuk mencegah *overfishing*, pemanfaatan energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin guna mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang merusak lingkungan, serta konservasi keanekaragaman hayati dengan menjaga habitat alami dan mencegah kepunahan spesies akibat aktivitas manusia.

3. Tantangan dan Hambatan

Meskipun kesadaran akan pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan semakin meningkat, terdapat berbagai tantangan dan hambatan yang menghambat implementasi pengelolaan SDA yang berkelanjutan.

a) Konflik antara Eksploitasi dan Konservasi

Salah satu tantangan terbesar dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) adalah konflik antara kebutuhan ekonomi dan konservasi lingkungan. Deforestasi untuk industri perkebunan, seperti kelapa sawit, sering kali mengakibatkan hilangnya habitat satwa liar, sementara penangkapan ikan berlebih (*overfishing*) menyebabkan penurunan stok ikan dan merusak keseimbangan ekosistem laut. Selain itu, pembangunan infrastruktur skala besar, seperti tambang dan bendungan, tidak jarang merusak ekosistem lokal dan memicu konflik dengan masyarakat adat.

b) Paradoks Ekonomi dan Ekologi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Paradoks ekonomi dan ekologi dalam pengelolaan sumber daya alam mengacu pada dilema di mana upaya pelestarian lingkungan sering dianggap sebagai penghambat pertumbuhan ekonomi, padahal dalam jangka panjang, degradasi lingkungan justru akan merugikan ekonomi. Banyak negara berkembang masih bergantung pada eksploitasi SDA, seperti pertambangan dan perikanan, sebagai sumber utama pendapatan, meskipun dampaknya terhadap lingkungan sangat besar. Selain itu, investasi dalam teknologi ramah lingkungan sering dianggap mahal karena biaya jangka pendeknya tinggi, meskipun dalam jangka panjang dapat menghemat biaya dan mencegah kerusakan lingkungan yang lebih besar.

Ekosentrisme dan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Berbasis Komunitas

Model pengelolaan berbasis komunitas dan kearifan lokal memiliki hubungan erat dengan nilai-nilai filsafat, terutama dalam etika lingkungan dan filsafat holistik. Model ini mencerminkan prinsip ekosentrisme, yang menekankan bahwa manusia bukan satu-satunya entitas yang berhak atas sumber daya alam, melainkan bagian dari sistem ekologis yang lebih besar. Menurut (Sarah & Hambali, 2023). Ekosentrisme mencakup seluruh komunitas ekologis, baik yang hidup maupun tidak, makhluk ekologis dengan objek abiotik lainnya terhubung satu sama lain. Konsep ini juga sejalan dengan filsafat *deep ecology*, yang menuntut kesadaran mendalam akan keterkaitan manusia dengan alam dan menolak eksploitasi berlebihan demi kepentingan ekonomi semata. Selain itu, nilai keadilan lingkungan dalam filsafat menegaskan pentingnya distribusi manfaat dan tanggung jawab yang adil, termasuk dalam model komunitas yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya. Kearifan lokal atau local wisdom merupakan bentuk pengetahuan lokal (*indigenous knowledge*) yang perlu digali dan banyak dipraktikkan di berbagai kawasan di Nusantara. Pemerintah mengakui kearifan lokal sebagai upaya konservasi yang tercantum pada Undang-undang nomor 32 pasal 1 ayat 30 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan: “Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari” (Persada et al., 2018). Menurut (Hidayat, 2011), Kelembagaan lokal tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam pada berbagai komunitas bersifat sistematis dan holistik, di mana keberadaan manusia dipandang tidak terpisah dari dan berada di atas alam, tetapi sebagai bagian integral yang tidak bisa dipisahkan dari dan menyatu dengan alam. Seperti Sasi di Maluku yang mengandung prinsip etika kebajikan (*virtue ethics*), di mana nilai-nilai kebersamaan, keseimbangan, dan tanggung jawab diwariskan secara turun-temurun sebagai pedoman dalam menjaga harmoni antara manusia dan lingkungan.

Gagalnya Pengelolaan Sumber Daya Alam Akibat Krisis Etika Lingkungan

Kegagalan pengelolaan sumber daya alam sering kali berakar pada krisis etika lingkungan, yaitu ketika manusia mengeksploitasi alam tanpa mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem. Ketika terjadi dilema antara aspek keberlanjutan lingkungan dan kepentingan ekonomi, keputusan yang diambil biasanya lebih berorientasi pada faktor ekonomi. Akibatnya, kondisi ini sering kali memicu munculnya konflik di masyarakat. Menurut data Walhi, pada tahun 2017 lima urutan teratas pemicu konflik di masyarakat adalah problem pencemaran, pertambangan, kehutanan, perikanan, dan perkebunan (Walhi 2018).

Krisis ini muncul akibat paradigma antroposentrisme yang berlebihan, di mana alam dipandang sebagai objek yang hanya dimanfaatkan demi kepentingan ekonomi dan industri tanpa memperhatikan keseimbangan ekologi. Akibatnya, terjadi berbagai bentuk degradasi lingkungan seperti deforestasi, pencemaran air dan udara, overfishing, serta kepunahan spesies. Pengabaian prinsip ekosentrisme dan keadilan lingkungan menyebabkan eksploitasi yang tidak adil, di mana manfaat sumber daya hanya dinikmati oleh segelintir pihak, sementara masyarakat lokal yang bergantung pada alam justru mengalami dampak negatif seperti hilangnya mata pencaharian dan bencana ekologis.

Overfishing dan Penurunan Stok Ikan di Beberapa Wilayah Perairan Indonesia

Overfishing atau penangkapan ikan berlebihan telah menjadi masalah serius dalam pengelolaan perikanan di Indonesia. Eksploitasi sumber daya ikan yang tidak terkendali menyebabkan stok ikan menurun drastis, terutama di wilayah perairan strategis seperti Laut Natuna, Laut Jawa, dan Selat Makassar serta di beberapa wilayah perairan di Indonesia. Kapal-kapal penangkap ikan skala besar, baik lokal maupun asing, sering kali menggunakan alat tangkap dengan kapasitas tinggi tanpa mempertimbangkan batas keberlanjutan stok ikan. *Overfishing* merupakan penyebab utama penurunan stok ikan di suatu lingkungan perairan (Latuconsina, 2020). Akibatnya, beberapa spesies ikan ekonomis penting seperti tuna, kakap

merah, dan kerapu mengalami tekanan eksploitasi yang berlebihan, bahkan mendekati titik kritis.

Dampak dari *overfishing* tidak hanya dirasakan pada sektor ekologi, tetapi juga ekonomi dan sosial. Nelayan tradisional yang menggunakan metode tangkap ramah lingkungan semakin sulit mendapatkan hasil tangkapan karena stok ikan terus berkurang. Hal ini berimbas pada penurunan pendapatan mereka dan meningkatkan risiko konflik dengan kapal penangkap ikan yang lebih besar. Selain itu, eksploitasi berlebihan juga mengganggu keseimbangan ekosistem laut, menyebabkan ketidakseimbangan dalam rantai makanan, yang pada akhirnya mengancam keberlanjutan perikanan di masa depan.

Peristiwa *overfishing* menggambarkan nilai filsafat manusia yang bersifat antroposentrisme. Dalam konteks *overfishing* paradigma ini mendorong eksploitasi ikan secara berlebihan karena fokus utamanya adalah keuntungan ekonomi, peningkatan produksi perikanan, dan pemenuhan kebutuhan manusia tanpa mempertimbangkan keberlanjutan stok ikan.

Deforestasi dan Degradasi Lahan dalam Proyek Food Estate

Proyek Food Estate di Kalimantan menjadi salah satu contoh kegagalan pengelolaan sumber daya alam akibat rendahnya etika lingkungan. Program ini menyebabkan pembukaan lahan dalam skala besar di kawasan hutan dan lahan gambut yang memiliki fungsi ekologis penting. Lahan gambut yang dikeringkan untuk dijadikan lahan pertanian mengalami penurunan kesuburan, pelepasan karbon dalam jumlah besar, serta meningkatkan risiko kebakaran hutan. Akibatnya, alih-alih meningkatkan produksi pangan, proyek ini justru memperburuk kondisi lingkungan dan mempercepat laju perubahan iklim.

Kegagalan proyek ini juga disebabkan oleh ketidaksesuaian lahan gambut dengan karakteristik pertanian skala besar. Tanah di daerah ini memiliki tingkat keasaman tinggi dan daya dukung yang rendah, sehingga sulit untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian tanpa dampak ekologis yang besar. Proyek serupa pernah gagal dalam Proyek Lahan Gambut Satu Juta Hektar di Kalimantan Tengah pada era Orde Baru, yang berakhir dengan kerusakan ekosistem tanpa hasil pertanian yang optimal.

Selain berdampak pada ekosistem, proyek ini juga menimbulkan ketimpangan sosial, terutama bagi masyarakat adat dan petani lokal yang bergantung pada hutan dan lahan di sekitarnya. Alih-alih memberdayakan masyarakat, proyek ini lebih menguntungkan perusahaan besar yang memiliki akses terhadap lahan dan modal. Menurut (Tampubolon & Purba, 2022), Ekstraksi kayu yang berlebihan, konversi lahan hutan, penyumbatan hidroelektrik, penambangan, dan sebagainya, berlanjut bukan karena pertimbangan filosofis, tetapi karena sangat menguntungkan industri. Banyak masyarakat kehilangan akses terhadap sumber daya alam yang sebelumnya mereka kelola secara berkelanjutan. Dalam jangka panjang, Food Estate tidak hanya gagal sebagai solusi ketahanan pangan, tetapi juga menjadi ancaman bagi kesejahteraan masyarakat lokal dan keberlanjutan lingkungan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1). Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan telah menyebabkan krisis lingkungan yang serius, sehingga pendekatan pragmatis yang hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek tidak lagi memadai dalam memastikan keberlanjutan ekosistem; 2). Integrasi filsafat dalam pengelolaan sumber daya alam berperan penting dalam membangun kesadaran ekologis dan etika lingkungan yang lebih mendalam; 3). Pandangan ekosentrisme dan biosentrisme menekankan bahwa manusia adalah bagian dari ekosistem yang lebih luas dan memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga keseimbangannya; 4). Penerapan konsep filosofi lingkungan dalam kebijakan dapat mendorong praktik pengelolaan yang lebih berkelanjutan..

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian atas bimbingan dan arahnya dalam penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan serta referensi yang berharga dalam proses penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariwidodo, E. (2023). Filsafat Lingkungan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. PRENADA; Jakarta.
- Armawi, A. (2013). Kajian Filosofis Terhadap Pemikiran Human-Ekologi Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam. *Jurnal Manusia dan Lingkungan*. 20(1), 57-67. <https://journal.ugm.ac.id/JML/article/view/18474/11767>
- Badan Pusat Statistik. (2018). Data Produk Domestik Bruto Menurut Penggunaan Atas Dasar Harga Konstan 2010. (Diakses pada 22 Februari 2019).
- Hidayat, (2011). Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kelembagaan Lokal. *Jurnal Sejarah CITRA LEKHA*. 14(1), 19-32. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/cilekha/article/view/3412>
- Kaelan, (2005). Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat, Penerbit Paradigma, Yogyakarta.
- Muthmainnah, L., Mustansyir, R., Tjahyadi, S. (2020). Kapitalisme, Krisis Ekologi, dan Keadilan Intergenerasi: Analisis Kritis atas Problem Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia. *Jurnal Mozaik Humaniora*, 20(1). <https://ejournal.unair.ac.id/MOZAIK/article/view/15754/pdf>
- Latuconsina, H. (2020). *Ekologi Ikan Perairan Tropis*. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.
- Nasution, L. Z. (2020). Penguatan Industri Halal bagi Daya Saing Wilayah: Tantangan dan Agenda Kebijakan. *Journal of Regional Economics Indonesia (JREI)*, 1(2), 33-57. <https://doi.org/10.26905/jrei.v1i2.5437>
- Pangesti, D. T., Razak, A., Syah, A., Syah, N., & Diliarosta, S. (2023). Permasalahan lingkungan hid Hubungan antara Pertumbuhan Populasi dan Kerusakan Lingkungan di Indonesia: Kajian Literatur. *Jurnal Kependudukan dan Pembangunan Lingkungan*. 4(2), 123-129. <http://jkpl.ppj.unp.ac.id/index.php/JKPL/article/view/164>
- Persada, N. P. R., Mangunjaya, F. M., Tobing, I. S. L. (2018). Sasi Sebagai Budaya Konservasi Sumber Daya Alam di Kepulauan Maluku. *Jurnal Ilmu dan Budaya*. 41(59), 6869-6900. <https://doi.org/10.47313/jib.v41i59.453>
- Qurrotul'ain, D., & Soleh, A. K. (2024). Krisis Lingkungan (Human-Ekologi) dalam Pandangan Filsafat Mulla Shadra. *Jurnal Pendidikan Indonesia*. 5(6), 250-258. <https://doi.org/10.59141/japendi.v5i6>
- Sarah, S., & Hambali, R. Y. A. (2023). Ekofilosofi "Deep Ecology" Pandangan Ekosentrisme terhadap Etika Deep Ecology. *Gunung Djati Conference Series*. 19. <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs>
- Tampubolon, Y. H., & Purba, D. F. (2022). Kapitalisme Global Sebagai Akar Kerusakan Lingkungan: Kritik terhadap Etika Lingkungan. *Jurnal Agama dan Masyarakat*. 9(1), 83-104. <https://doi.org/10.33550/sd.v9i1.265>
- Walhi. 2018. "Tinjauan Lingkungan Hidup 2018." https://walhi.or.id/wp-content/uploads/2018/12/Layout_Tinjauan-Lingkungan-2018.pdf